MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing–masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing–masing Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN DXXI
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A .	TENAGA KESEHATAN	50	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA | SEKSI PEMBINAAN DAN KESERTAAN KB
3.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SEKSI PROMOSI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
4.	APOTEKER AHLI PERTAMA	8	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	7	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	6	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B .	TENAGA TEKNIS		950	
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KESATUAN BANGSA | SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK
2.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TRANSMIGRASI | SEKSI PENYIAPAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS
3.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PELAYARAN | SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN
4.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
5.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG VERIFIKASI
8.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL | SEKSI FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDAFTARAN PENDUDUK
9.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
10.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DAN TUNA SOSIAL DAN KORBAN
12.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PERHUBUNGAN UDARA | SEKSI FASILITAS DAN LAYANAN PENERBANGAN/ BANDAR UDARA
13.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG SUMBER DAYA AIR | SEKSI PELAKSANAAN SDA
14.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN | BAGIAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT | SUB BAGIAN PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT
15.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ;	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	PERTAMA	S-1 MANAJEMEN		SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK | SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO
16.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
17.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK | SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
18.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN II
19.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN AKADEMI KOMUNITAS | SEKSI PENDIDIKAN KHUSUS
20.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KESATUAN BANGSA | SUB BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA
21.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
22.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PERHUBUNGAN UDARA | SEKSI PENGOPERASIAN PENERBANGAN/ BANDAR UDARA
23.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN | SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN
24.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PEMBINAAN PENILAIAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN ASN
25.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
26.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SUB BAGIAN PROGRAM
27.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN TATA USAHA
28.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN | SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT, PENYALURAN BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN
29.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | BAGIAN BUMD DAN BLUD

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				| SUB BAGIAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
30.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH | SUB BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN
31.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PELAYARAN | SEKSI BADAN USAHA DAN JASA TERKAIT ANGKUTAN PELAYARAN
32.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN | SUB BIDANG DUKUNGAN TEKNIS PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN
33.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN FASILITASI PENDIDIKAN | SEKSI DATA DAN INFORMASI
34.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN TATALAKSANA | SUB BAGIAN TATA USAHA
35.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN | SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN
36.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | BIDANG KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN POTENSI KAMPUNG/ KAMPUNG ADAT | SEKSI PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA, PEMETAAN DAN PENDAYAGUNAAN RUANG KAMPUNG/ KAMPUNG ADAT
37.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | BIDANG KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN POTENSI KAMPUNG/ KAMPUNG ADAT | SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
38.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN AKADEMI KOMUNITAS | SEKSI PENDIDIKAN AKADEMI KOMUNITAS
39.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
40.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
41.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI, DAN/ATAU BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
42.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG KEPEMUDAAN | SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA
43.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
44.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ;	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI		SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT
45.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
46.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG KEOLAHRAGAAN | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN OLAHRAGA
47.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
48.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN FASILITASI PENDIDIKAN | SEKSI FASILITASI LAYANAN PENDIDIKAN TAMBAHAN
49.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN TATALAKSANA | SUB BAGIAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN
50.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA | SUB BAGIAN BUDAYA KERJA
51.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BMD
52.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN RUMAH TANGGA | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA GUBERNUR
53.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
54.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TRANSMIGRASI | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
55.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SUB BAGIAN TATA USAHA
56.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SUB BAGIAN KEUANGAN
57.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK DAN LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
58.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | BAGIAN BUMD DAN BLUD | SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH, JASA KEUANGAN DAN ANEKA USAHA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
59.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN AKADEMI KOMUNITAS | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
60.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | BIDANG KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN POTENSI KAMPUNG/ KAMPUNG ADAT | SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN KAPASITAS MASYARAKAT
61.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA
62.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI | SEKSI BINA KONSTRUKSI
63.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SUB BAGIAN BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
64.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | SEKSI PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK
65.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN | SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
66.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PELAYARAN | SEKSI PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN
67.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN | BAGIAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT | SUB BAGIAN FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT ADAT
68.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
69.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SUB BAGIAN UMUM
70.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
71.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA
72.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUB BAG PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN
73.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ;	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	PERTAMA	S-1 MANAJEMEN		SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET SETDA | SUB BAGIAN PENGGUNAAN, PENGAMANAN, DAN PEMELIHARAAN ASET SETDA;
74.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
75.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN | SEKSI OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN
76.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT | SEKSI KERJASAMA KAMPUNG/ KAMPUNG ADAT
77.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA | SUB BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP, PERIKANAN DAN KELAUTAN, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM, DUNIA USAHA DAN INVESTASI
78.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA | SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI
79.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN | SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN
80.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
81.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR
82.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PERHUBUNGAN UDARA | SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENERBANGAN/ BANDAR UDARA
83.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 GIZI ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; S-1 TEKNIK PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
84.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP ; D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
85.	ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA/SMA SEDERAJAT	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG KEOLAHRAGAAN | SEKSI PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
86.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIKA	20	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | INSPEKTORAT DAERAH
87.	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN PENGATURAN PERDASUS DAN PERDASI
88.	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA | SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH III
89.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KERJA SAMA
90.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 SAINS POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH
91.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN OTONOMI KHUSUS DAN PENATAAN URUSAN
92.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV RELASI INDUSTRI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM BISNIS	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
93.	OPERATOR ALAT BERAT	SEKOLAH MENENGAH ATAS ; SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN
94.	OPERATOR ALAT BERAT	SEKOLAH MENENGAH ATAS ; SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
95.	OPERATOR ALAT BERAT	SEKOLAH MENENGAH ATAS ; SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI | SEKSI BINA KONSTRUKSI
96.	OPERATOR ALAT BERAT	SEKOLAH MENENGAH ATAS ; SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
97.	OPERATOR ALAT BERAT	SEKOLAH MENENGAH ATAS ; SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI | SEKSI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
98.	OPERATOR ALAT BERAT	SEKOLAH MENENGAH ATAS ; SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | SEKSI TATA RUANG
99.	OPERATOR ALAT BERAT	SEKOLAH MENENGAH ATAS ; SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI | SEKSI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
100.	OPERATOR ALAT BERAT	SEKOLAH MENENGAH ATAS ; SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG SUMBER DAYA AIR | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
101.	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
102.	PAMONG PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 SAINS POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH
103.	PAMONG PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 SAINS POLITIK	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD
104.	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	20	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN
105.	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	20	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BAHAYA KEBAKARAN
106.	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK	20	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKSI DATA INFORMASI DAN PENGAWASAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
107.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN
108.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA | SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH I
109.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN | BAGIAN ADMINISTRASI PELAYANAN MAJELIS DAN PERSIDANGAN | SUB BAGIAN PERSIDANGAN
110.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
111.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA | SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI
112.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ;	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA | SEKSI LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		S-1 REKAYASA MESIN ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI		
113.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA | SEKSI INFRASTRUKTUR INFORMATIKA
114.	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 SASTRA ARAB ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
115.	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 SASTRA INGGRIS	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SUB BAGIAN TATA USAHA
116.	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SASTRA ARAB ; S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
117.	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 SASTRA ARAB	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
118.	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS ; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN ARAB ; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN BELANDA ; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG ; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN JERMAN ; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA ; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN PERANCIS ; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN RUSIA ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN ADMINISTRASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
119.	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN | BAGIAN UMUM DAN HUMAS | SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
120.	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK ELEKTRO OTOMOTIF ; SMK KONSTRUKSI GEDUNG, SANITASI DAN PERAWATAN ; SMK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN ; SMK TEKNIK ELEKTRONIKA ; SMK TEKNIK GAMBAR BANGUNAN ; SMK TEKNIK GAMBAR MESIN ; SMK TEKNIK MESIN ; SMK TEKNIK SURVEI DAN PEMETAAN ; SMK TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN ; SMK GEOLOGI PERTAMBANGAN	18	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
121.	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK	15	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN AIR MINUM
122.	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK	15	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG SUMBER DAYA AIR | SEKSI PELAKSANAAN SDA
123.	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	D-III ARSITEKTUR ; D-III GEOLOGI ; D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI ; D-III KONSTRUKSI GEDUNG ; D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN ; D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN ; D-III PENGELOLAAN SUMBER	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG SUMBER DAYA AIR | SEKSI PELAKSANAAN SDA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		DAYA LAHAN ; D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-III PERTAMANAN ; D-III TEKNIK SIPIL		
124.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KELAUTAN ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 STUDI PERTAHANAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
125.	PENELITI AHLI PERTAMA	S-2 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-2 AGROTEKNOLOGI ; S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-2 REKAYASA SUMBER DAYA AIR ; S-2 ANTROPOLOGI ; S-2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN ; S-2 MANAJEMEN PENDIDIKAN ; S-2 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; S-2 ILMU PEMERINTAHAN ; S-2 STUDI PEMERINTAHAN ; S-2 TRANSPORTASI ; S-2 TEKNIK INFORMATIKA ; S-2 HUKUM ; S-2 MANAJEMEN ; S-2 EKONOMI ; S-2 FARMASI ; S-2 TEKNIK SIPIL	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | BIDANG RISET DAN INOVASI
126.	PENGAWAS BENIH TANAMAN PEMULA	SMK PERTANIAN	15	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | SEKSI BUDI DAYA PERTANIAN
127.	PENGAWAS BENIH TANAMAN TERAMPIL	D-III AGRONOMI ; D-III BUDIDAYA PERTANIAN ; D-III PERBENIHAN ; D-III PERKEBUNAN ; D-III PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN ; D-III TEKNOLOGI BENIH ; D-III TEKNOLOGI PERTANIAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN | SEKSI BUDI DAYA PERTANIAN
128.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK SISTEM ENERGI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
129.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK SISTEM ENERGI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN EVALUASI
130.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK SISTEM ENERGI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN
131.	PENGAWAS MUTU PAKAN PEMULA	SEKOLAH PETERNAKAN MENENGAH ATAS ; SMK AGROBISNIS PRODUKSI TERNAK ; SMK PETERNAKAN ; SPP PETERNAKAN	16	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PANGAN | SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
132.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK KELAUTAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	15	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | INSPEKTORAT DAERAH
133.	PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA	D-IV AKUAKULTUR ; D-IV ILMU ATAU SAINS PERIKANAN ; D-IV ILMU KELAUTAN ; D-IV MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN ; D-IV PERIKANAN TANGKAP ; D-IV PERMESINAN PERIKANAN ; D-IV SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; D-IV SUMBER DAYA AKUATIK ; D-IV TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN ; D-IV TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN ; S-1 AKUAKULTUR ; S-1 ILMU ATAU SAINS PERIKANAN ; S-1 ILMU KELAUTAN ; S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 PERIKANAN TANGKAP ; S-1 PERMESINAN PERIKANAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; S-1 SUMBER DAYA AKUATIK ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PERIKANAN TANGKAP DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
134.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TRANSPORTASI DARAT ; S-1 ILMU MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT ; D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		DARAT ; D-IV MANAJEMEN PERHUBUNGAN DARAT ; S-1 MESIN ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK SIPIL TRANSPORTASI		ANGKUTAN JALAN | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN REKAYASA LALU LINTAS
135.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN | BAGIAN ADMINISTRASI PELAYANAN MAJELIS DAN PERSIDANGAN | SUB BAGIAN PELAYANAN KELOMPOK KERJA MAJELIS
136.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP,KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
137.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SUB BAGIAN TATA USAHA
138.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III BAHASA INGGRIS	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN | BAGIAN UMUM DAN HUMAS | SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
139.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
140.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
141.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III BAHASA ARAB ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III PERHOTELAN ; D-III TATA BOGA	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
142.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
143.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
144.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN ; D-III PERHOTELAN ; D-III TATA BOGA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN BANTUAN HUKUM | SUB BAGIAN TATA USAHA
145.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN ; D-III PERHOTELAN ; D-III TATA BOGA	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN ADMINISTRASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
146.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SUB BAGIAN UMUM
147.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III KOMUNIKASI MASSA	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
148.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
149.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III MANAJEMEN		SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN TATALAKSANA | SUB BAGIAN TATA USAHA
150.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN ; D-III BAHASA ARAB	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
151.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | SUB BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PUBLIKASI
152.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN UMUM
153.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA ARAB ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO
154.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III GIZI ; D-III KEBIDANAN ; D-III KEPERAWATAN ; D-III KEPERAWATAN GIGI ; D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
155.	PENGUJI MUTU BARANG PEMULA	SMK TEKNIK	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI DAN UKM | SEKSI KOPERASI
156.	PENGUJI MUTU BARANG PEMULA	SMK TEKNIK	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI DAN UKM | SEKSI USAHA MIKRO DAN KECIL
157.	PENGUJI MUTU BARANG PEMULA	SMK TEKNIK	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERDAGANGAN | SEKSI SARANA PERDAGANGAN DAN FASILITASI EKSPOR
158.	PENGUJI MUTU BARANG PEMULA	SMK TEKNIK	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERDAGANGAN | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN
159.	PENGUJI MUTU BARANG PEMULA	SMK TEKNIK	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI DAN UKM | SEKSI KEWIRAUSAHAAN
160.	PENYULUH KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
161.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA ; D-IV KESEHATAN HEWAN ; D-IV PENYULUH PERTANIAN ; D-IV PETERNAKAN ; D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA ; S-1 AGRIBISNIS PETERNAKAN ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 AGRONOMI ; S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN ; S-1 ILMU EKONOMI PERTANIAN ; S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK	6	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
162.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN | BAGIAN ADMINISTRASI PELAYANAN MAJELIS DAN PERSIDANGAN | SUB BAGIAN PERSIDANGAN
163.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | SUB BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PUBLIKASI
164.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA | SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH I
165.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN | BAGIAN ADMINISTRASI PELAYANAN MAJELIS DAN PERSIDANGAN | SUB BAGIAN PELAYANAN KELOMPOK KERJA MAJELIS
166.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
167.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PLANOLOGI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	13	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
168.	PETUGAS PENGAMAN HUTAN DAN HASIL HUTAN	SLTA/SMA SEDERAJAT ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SMK	38	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN | SEKSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN
169.	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TRANSPORTASI DARAT ; S-1 ILMU MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT ; D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT ; D-IV MANAJEMEN PERHUBUNGAN DARAT ; S-1 MESIN ; S-1 TEKNIK SIPIL TRANSPORTASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
170.	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
171.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SMK ; SLTA KEJURUAN ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK TEKNIK	38	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
172.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA KEJURUAN ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	38	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
173.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA KEJURUAN ; SMA IPA ; SMA IPS	38	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
174.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III PENCAK SILAT ; D-III JURNALISTIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III AKUNTANSI ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III FOTOGRAFI ; D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN ; D-III TEKNOLOGI SIPIL	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
175.	PRANATA KEWILAYAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI ; S-1 SAINS LINGKUNGAN ; S-1 STATISTIKA ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH
176.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA | SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI
177.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN | BAGIAN KEUANGAN | SUB BAGIAN PEMBAYARAN, PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI
178.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN FASILITASI PENDIDIKAN | SEKSI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI		DATA DAN INFORMASI
179.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET SETDA | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN VERIFIKASI SETDA;
180.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT | SEKSI PEMASARAN PRODUK UNGGULAN KAMPUNG/ KAMPUNG ADAT
181.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA | SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
182.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH | SUB BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN
183.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK | SUB BAGIAN PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
184.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PELAYARAN | SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN
185.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | SEKSI ANGKUTAN DAN TERMINAL
186.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
187.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
188.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN | BAGIAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT | SUB BAGIAN PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT
189.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
190.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
191.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SUB

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI		BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BMD
192.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN TATALAKSANA | SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK
193.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN | BAGIAN ADMINISTRASI PELAYANAN MAJELIS DAN PERSIDANGAN | SUB BAGIAN PERSIDANGAN
194.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | SEKSI PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK
195.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN | SEKSI TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN
196.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN TATALAKSANA | SUB BAGIAN TATA USAHA
197.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SUB BAGIAN UMUM
198.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS ; D-IV SISTEM SIBER-FISIK ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI PERMAINAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SAINS KOMPUTASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
199.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KESATUAN BANGSA | SUB BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA
200.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | SUB BIDANG PEMANFAATAN, PENILAIAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
201.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI		KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
202.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN FASILITASI PENDIDIKAN | SEKSI FASILITASI LAYANAN PENDIDIKAN TAMBAHAN
203.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN | BAGIAN KEUANGAN | SUB BAGIAN ANGGARAN
204.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SUB BAGIAN PROGRAM
205.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG KEOLAHRAGAAN | SEKSI PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
206.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUB BAG PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN
207.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | BAGIAN BUMD DAN BLUD | SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH, JASA KEUANGAN DAN ANEKA USAHA
208.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
209.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS ; D-IV SISTEM SIBER-FISIK ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI PERMAINAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SAINS KOMPUTASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | SUB BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PUBLIKASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI		
210.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA | SUB BIDANG PENDIDIKAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN OLAHRAGA DAN PEMUDA, KESEHATAN, SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN
211.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | SUB BAGIAN PROGRAM
212.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
213.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SUB BAGIAN BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
214.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
215.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BAGIAN PROGRAM
216.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI | SUB BIDANG PERPINDAHAN DAN PENSIUN
217.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN AKADEMI KOMUNITAS | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
218.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
219.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | SEKRETARIAT PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN
220.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TRANSMIGRASI | SEKSI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
221.	PRANATA KOMPUTER AHLI	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	PERTAMA	TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI		SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN I
222.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM | BAGIAN BANTUAN HUKUM | SUB BAGIAN LITIGASI
223.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN | SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN
224.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN | SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN
225.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SAINS KOMPUTASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | BAGIAN BUMD DAN BLUD | SUB BAGIAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
226.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
227.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 SAINS KOMPUTASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL
228.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN | SEKSI KELEMBAGAAN, KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL
229.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
230.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; S-1 SAINS KOMPUTASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN TATA USAHA
231.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR DAN MANAJERIAL
232.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | BIDANG TENAGA KERJA | SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI		
233.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS ; D-IV SISTEM SIBER-FISIK ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI PERMAINAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SAINS KOMPUTASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN | SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN
234.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN DAN SISTEM INFORMASI ASN | SUB BIDANG FASILITASI PROFESI ASN
235.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI
236.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
237.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
238.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO ORGANISASI | BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA | SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA
239.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN | SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH
240.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS ; D-IV SISTEM SIBER-FISIK ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI PERMAINAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SAINS KOMPUTASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS
241.	PRANATA KOMPUTER AHLI	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	PERTAMA	TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI		SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK | SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
242.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
243.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA | SEKSI INFRASTRUKTUR INFORMATIKA
244.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG UMUM | BIRO UMUM | BAGIAN RUMAH TANGGA | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA WAKIL GUBERNUR
245.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN OTONOMI KHUSUS | SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD
246.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN AKADEMI KOMUNITAS | SEKSI PENDIDIKAN KHUSUS
247.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN | BAGIAN UMUM DAN HUMAS | SUB BAGIAN UMUM
248.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PANGAN | SEKSI DISTIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
249.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KESATUAN BANGSA | SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK
250.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | SUB BAGIAN PROGRAM
251.	PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA/SMA SEDERAJAT	20	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BAHAYA KEBAKARAN
252.	WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	S-2 ADMINISTRASI BISNIS ; S-2 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-2 ANTROPOLOGI ; S-2 ARSITEKTUR ; S-2 EKONOMI ; S-2 FARMASI ; S-2 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-2 HUKUM ; S-2 ILMU INFORMATIKA ; S-2 TEKNIK SIPIL ; S-2 HUKUM AGRARIA DAN PERTANAHAN ; S-2 TRANSPORTASI ; S-2 MANAJEMEN ; S-2 PENDIDIKAN MATEMATIKA ; S-2 PENDIDIKAN FISIKA ; S-2 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN ; S-2 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN ; S-2 ILMU PERTANIAN ; S-2 KEHUTANAN ; S-2 BIOLOGI TUMBUHAN ; S-2 AGRONOMI ; S-2 BAHASA INGGRIS ; S-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ; S-2 KENOTARIATAN	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA